

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PPID BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NTB TAHUN 2024

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	RELEVANSI/ ALASAN	RETENSI WAKTU
1	Data SP2D ke pihak ke-3	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 No.2 2. PP No.61 Tahun 2020 Pasal 3 3. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31 4. Permendagri13 Tahun 2006	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Perlindungan usaha	permanen
2	Laporan keuangan yang belum di audit BPK	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No.61 Tahun 2020 Pasal 3 3. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31 4. Permendagri 13 Tahun 2006	1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi	Kelancaran proses pemeriksaan	Sampai hasil laporan pemeriksaan BPK diterbitkan
3	Proses evaluasi pengadaan barang dan jasa	1. UUNo. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b 2. PPNo.61Tahun 2010 Pasal 3	Melindungi pihak yang terlibat kontrak	Perlindungan usaha	permanen
4	Dokumen penawaran barang dan jasa	1. UUNo. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b 2. PPNo.61Tahun 2010 Pasal 3	1. Melindungi pihak yang terlibat kontrak 2. Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Perlindungan usaha	Sampai dengan proses penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak
5	Data Pribadi penerima bantuan	1. UU No. 14 Tahun 2003 Pasal 17 g dan h 2. PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi orang	Keamanan individu	sampai memperoleh persetujuan dari orang yang bersangkutan
6	Daftar user dan pasword server / aplikasi / perangkat TIK	1. UU No. 14 Tahun 2003 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30-37 4. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1, Pasal 12 ayat 1 (b) 5. Permenkominfo No.4 Tahun 2016	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Keamanan Data	Permanen
7	Data Pengawai ASN	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf g dan h 2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 127 3. UU 25 Tahun 2014 Pasal 128	Menjamin efisiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN	Efektifitas dan akurasi data ASN	selama masih berlaku
8	Dokumen LHKPN	1. UU NO. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 j 2. UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana pasal 322 3. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44	1. Mengganggu kenyamanan Privacy 2. Timbulnya penyimpangan	Relevan, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum Menjaga keakuratan data pemeriksaan Selama dalam proses lelang /	

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	RELEVANSI/ ALASAN	RETENSI WAKTU
		4. Keputusan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi No.KEP.07/KPK/02/2005 Tata Cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara		pengadaan sebelum diumumkan Mencegah terjadinya tindak korupsi atau penyalahgunaan wewenang	
9	Data pengaduan masyarakat laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat	1. UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j : informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 6 3. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	1. Menyangkut Privasi 2. Mengganggu Proses Penyelidikan Pengawasan	Menjaga Kelangsungan proses hukum	sampai ada keputusan hasil pengaduan

Mataram, 29 Januari 2024
KEPALA BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si.
Pembina/Utama Madya
NIP. 19651231 1994031 153